
MODERNISASI ORANG MELAYU DI KOTA MEDAN, 1891-1946

Mhd. Alif Ichsan

Mahasiswa Magister Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Email: alifichsan97@gmail.com

Abstract

This research discusses the factors that pushed and hindered the modernization of the Malays in 1891-1946. The meaning of modernization in this research was an awareness of movement and progress that causes old rules to be challenged and boundaries that have long been well-formed of crossed. This study was conducted using historical methods. The research method used is historical methods which include heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results showed that three factors drove the modernization of Malays in Medan: the political agreement with the Netherlands, the success of the foreign plantation business, and change of Medan into Gemeente. Modernization is manifested in the aspects of education, housing, lifestyle and the arts. The development of modernization of the Malays was hampered by the competition between ethnic groups and the social revolution in 1946.

Keywords: *Modernization, Malays, Medan.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat modernisasi orang Melayu pada tahun 1891-1946. Arti modernisasi dalam penelitian ini adalah suatu kesadaran tentang gerakan dan kemajuan yang menyebabkan kaidah-kaidah lama tertantang dan garis-garis batas yang telah lama terbentuk dengan baik dilewati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor yang mendorong modernisasi orang Melayu di Medan: perjanjian politik dengan Belanda, kesuksesan usaha perkebunan asing, dan perubahan Medan menjadi Gemeente. Modernitas tampak pada pendidikan, perumahan, gaya hidup dan kesenian. Modernisasi diwujudkan dalam aspek pendidikan, perumahan, gaya hidup dan kesenian. Perkembangan modernisasi orang Melayu terhambat oleh persaingan antar kelompok etnis dan revolusi sosial pada tahun 1946.

Kata Kunci: Modernisasi, Orang Melayu, Medan.

PENDAHULUAN

Memasuki awal abad ke-20, Medan dan kota-kota lain di Hindia Belanda mengalami modernisasi yang begitu pesat. Berbeda dengan kota-kota lain ciptaan kolonial Belanda di Indonesia, modernitas kota Medan merupakan kehendak para pengusaha perkebunan yang ingin men-

jadikannya poros ekonomi di kawasan pantai timur Sumatera (Nasution, 2018: 66). Perkembangan industri perkebunan telah pembangunan berbagai fasilitas modern, seperti jalan raya dan lampu-lampu yang semakin memperindah tampilan jalan (Sinar, 2011: 25-26).

Modernitas kota Medan dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu kelompok etnis yang dapat merasakan modernitas itu adalah orang Melayu, kelompok etnik tuan rumah. Orang Melayu merupakan pribadi yang sopan dan tenang di dalam gaya dan tindakan. Orang Melayu juga dikenal menaruh hormat yang tinggi terhadap para pembesar di kalangan mereka (Sinar, 2005: 28). Selain itu, orang Melayu diakui pula oleh Vallentijn dalam Isjoni (2012: 29) sebagai sosok yang cerdas, pintar, pembersih, rupawan dan suka memperluas pengetahuan mereka dengan mempelajari bahasa Arab.

Orang Melayu merupakan kelompok etnis yang terikat dengan adat. Hal ini dikarenakan adat menunjukkan identitas dan kepribadian orang Melayu. Oleh karena itu, segala bentuk budaya yang masuk dari luar selalu disesuaikan dengan adat yang berlaku di dalam kearifan lokal orang Melayu (Isjoni, 2012: 30-32). Adapun klasifikasi adat bagi orang Melayu terdiri atas 4 (empat) jenis. *Pertama, adat yang sebenarnya adat*, yakni hukum alam yang memang harus terjadi dan tidak dapat dikurangi maupun ditambah. *Kedua, adat yang diadatkan*, yakni adat yang terbentuk sebagai hasil dari kata mufakat dalam musyawarah di kalangan masyarakat dan tujuannya adalah demi kebahagiaan rakyat. *Ketiga, adat yang teradat*, yakni berbagai kebiasaan yang dalam perjalanannya dapat berubah menjadi adat, baik dengan proses yang lama maupun secara tiba-tiba. *Keempat, adat istiadat*, yakni berupa upacara-upacara khusus sebagai himpunan dari berbagai kebiasaan yang ada (Husny, 1986: 231-234). Keempat klasifikasi adat inilah yang digunakan orang Melayu dalam menerima budaya asing ketika mereka mengalami proses modernisasi di Medan.

Orang Melayu dapat menikmati modernisasi di masa kolonial karena saat itu mereka adalah penguasa di Deli yang mencakup wilayah kota Medan (Takari, 2012: 70). Keuntungan yang diperoleh dari sewa tanah perkebunan menambah pundi-pundi kekayaan Sultan Deli.

Hasil sewa tanah ini diberikan oleh para pengusaha perkebunan asing kepada sultan dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Hal inilah yang pada akhirnya membawa orang Melayu ke pusaran modernisasi di Medan (Reid, 2012: 65).

Ketika kota Medan ditetapkan menjadi *gemeente* pada tahun 1909, modernisasi semakin menguat dengan campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Berbagai bisnis selain perkebunan pun berkembang di kota Medan, seperti perusahaan kereta api, perusahaan air bersih, perusahaan listrik, rumah sakit, perhotelan, dan toserba (toko serba ada). Keberadaan beraneka macam usaha ini dengan otomatis melengkapi infrastruktur kota Medan yang modern (Nasution, 2018). Orang Melayu ikut menjadi bagian dari proses modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu. Orang Melayu yang memiliki kedekatan dengan Belanda lewat kontrak politik sudah tentu mendapat pengaruh atas perkembangan kota Medan, dan turut menyelaraskan gaya hidup mereka dengan kemajuan kota itu. Modernisasi yang dialami orang Melayu ditandai dengan akses terhadap pendidikan Barat, pembangunan istana dan permukiman mewah, serta bergaya hidup modern.

Berbagai kemajuan yang dialami orang Melayu sebagai akibat dari modernisasi yang dilakukan oleh Belanda mulai memudar seiring dengan migrasi kelompok etnis lain ke kota Medan dan hilangnya kekuasaan orang Melayu akibat revolusi sosial tahun 1946. Umumnya migrasi didorong oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti perbedaan tingkat kemakmuran desa dengan kota, tingkat konsumsi dan produksi di pedesaan yang lebih rendah daripada yang terdapat di perkotaan, serta pertumbuhan ekonomi yang berjalan lebih lambat di pedesaan dibandingkan dengan yang berlangsung di perkotaan (Takari, 2012: 30).

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini akan mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses modernisasi terhadap orang Melayu, bentuk-bentuk moderni-

sasi yang mereka alami di kota Medan sejak tahun 1891 sampai 1946. Modernisasi dalam kajian ini diartikan sebagai kesasaran akan gerakan dan kemajuan yang menyebabkan kebiasaan-kebiasaan lama menjadi ditantang dan garis-garis batas yang mapan dilangkahi.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah atau tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau eksplanasi (Priyadi, 2015). Dalam mengungkapkan problematika aspek-aspek yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan melihat gagasan baru tentang gerakan dan perubahan yang lebih jelas bagi orang Melayu yang menantang kebiasaan-kebiasaan lama dan melangkahi garis-garis moral yang sudah mapan (Nordholt, 2002: 247). Penggunaan metode sejarah didukung dengan penggunaan konsep dan teori dari ilmu-ilmu bantu. Narasi dibangun berdasarkan data studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pendorong Modernisasi

Adapun faktor-faktor yang pendorong modernisasi orang Melayu di kota Medan adalah: 1) kesuksesan usaha perkebunan asing di Deli, 2) perjanjian politik dengan kolonial Belanda, dan 3) perkembangan Medan menjadi *gemeente*.

1. Perkembangan Industri Perkebunan Barat

Pembicaraan mengenai kesuksesan usaha perkebunan asing harus berpangkal pada kisah sang perintis, Jacobus Nienhuys. Nienhuys tidak pernah menyangka akan menaiki tangga kesuksesannya di Deli. Misi yang ditugaskan oleh perusahaan dagang *Pieter van den Arend & Consortium* kepada Nienhuys hanyalah mencari lahan yang cocok untuk menanam tembakau di pulau Jawa saja. Lahan yang dibutuhkan tidak begitu besar, hanya untuk perkebunan kecil, yakni sekitar 75-150 hektar. Namun, Nienhuys ternyata kewalahan dan hampir putus asa untuk

menemukan lahan seukuran itu. Hal ini dikarenakan lokasi dengan kondisi semacam itu sukar ditemukan (Pelzer, 1985: 51).

Perjuangan Nienhuys baru terbayar lunas setelah bertemu dengan Said Abdullah Bilsagih di Surabaya. Ia merupakan ipar dari Sultan Mahmud Perkasa Alam di Deli. Pertemuan Nienhuys dan Bilsagih terjadi berkat undangan *J.F. van Leeuwen & Co.* Perusahaan dagang yang berdomisili di Surabaya ini merupakan kawan dagang dari perusahaan yang mengutus Nienhuys. Bilsagih kemudian menjelaskan dengan sangat persuasif akan potensi mendapatkan tembakau yang baik jika ditanam di Deli. Bilsagih berani menyarankan tanah di Deli dikarenakan orang Melayu memang telah lama mengenal penanaman tembakau (Pelzer, 1985: 51-52). Mereka juga telah mengusahakan tanaman lain seperti lada, padi, dan tebu. Orang Melayu bahkan telah mengeksport berbagai hasil alamnya ke negeri tetangga seperti Malaka, Penang, dan Singapura (Anderson, 1826: 278-280).

Penantian panjang dan ketertarikan Nienhuys yang begitu besar terhadap uraian Bilsagih mengantarkannya ke Deli pada tahun 1863 (Pelzer, 1985: 51-52). Sultan Deli pun menyambut niat Nienhuys untuk membuka perkebunan tembakau di Deli dengan memberikan 4.000 bahu tanah di dekat Labuhan, Tanjung Sepassai. Tanah itu diberikan secara *erfpacht*, hak guna usaha untuk menikmati tanah kepunyaan orang lain, selama 20 tahun.

Sultan Deli, sebagai pucuk pimpinan orang Melayu memperoleh keuntungan yang cukup besar dari perkebunan. Sultan mendapat penghasilan dari penarikan cukai impor dan ekspor, serta tidak jarang mendapatkan hasil dari pajak atas setiap kuli yang dipekerjakan (Bremen, 1997: 28). Keuntungan yang didapatkan oleh Sultan Deli itu tidak hanya dipergunakan untuk pribadi Sultan beserta para pembesarnya, namun juga untuk kesejahteraan rakyat Deli. Para datuk yang bersekutu dengan sultan bahkan mendapat bagian tidak kurang dari 49%. Hal inilah yang mendorong modernisasi

orang Melayu. Pembangunan berbagai fasilitas gencar dilakukan. Sultan dan para datuk juga membangun rumah-rumah (istana) mereka yang mewah dengan sumber penghasilan baru ini (Muchrizad, 2019).

Sumber lain menginformasikan bahwa pada tahun 1915, Sultan Deli dan para kepala sukunya (para datuk) menerima 39,2% dari total pendapatan wilayah Deli. Keuntungan itu mereka terima dalam bentuk gaji resmi berikut royalti dalam bagian cukup besar yang memang menjadi hak mereka. Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam (1925-1945), Sultan Deli ke-10, bahkan tercatat memperoleh penghasilan sebesar f 184.568 (Reid, 2012: 66).

Keuntungan dari tumbuhnya perkebunan asing di Deli tidak hanya diperoleh Sultan saja. Orang Melayu secara umum juga memperoleh posisi strategis. Mereka bertindak sebagai leveransir dalam menyediakan berbagai keperluan para pengusaha perkebunan. Mereka menjadi pemasok bambu, kayu laut, nipah, dan tepas. Oleh karena itu, muncul lebih banyak orang Melayu yang bergelar Orang Kaya (O.K.) sebagai akibat dari meningkatnya taraf hidup di kalangan mereka (Muchrizad, 2019).

Hal senada sebagaimana yang disampaikan Tengku Muchrizad di atas diutarakan pula oleh Pelzer (1985: 80-81). Ia menyatakan bahwa masyarakat setempat yang bermukim di daerah-daerah pantai, tentunya orang-orang Melayu, mendapat keuntungan dengan cara memasok nipah ke para pengusaha *onderneming*. Para pengusaha *onderneming* membutuhkan nipah sebagai atap gudang-gudang tembakau mereka.

2. Kontrak Politik

Seiring dengan tumbuhnya pengusaha perkebunan di Deli, lahir pula perjanjian politik antara Kesultanan Deli dengan kolonial Belanda. Perjanjian politik ini disadari oleh pihak kolonial Belanda sebagai sesuatu yang esensial. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama saja tidak cukup meneguhkan pijakan kaki mereka di Sumatera Timur, khususnya di Deli khususnya.

Sumatera Timur merupakan lumbung uang bagi para pengusaha asing, terutama bagi mereka yang berasal dari negeri kincir angin itu. Pihak kolonial Belanda tentu tidak ingin lumbung uang mereka itu berpindah tangan.

Politik adalah sarana yang tepat untuk memuluskan jalan Belanda agar terhindar dari ancaman yang di atas. Pihak kolonial Belanda akan mampu mengontrol apapun untuk terus melanggengkan pengaruh dan kekuasaannya dengan jalur politik. Lewat perjanjian politik, pihak kolonial Belanda mendikte kebijakan sultan secara tidak langsung. Mereka juga dapat memperbaharui perjanjian itu kapanpun jika pada masanya dirasa sudah kurang menguntungkan. Kesadaran inilah yang menuntut Belanda untuk sejak awal kedatangannya ke Deli pada tahun 1862 telah melakukan langkah-langkah politik dengan adanya *Acte van Verband* yang direvisi berulang-ulang hingga berganti menjadi *Politiek Contract* pada tahun 1907 (Takari, 2012: 79-83).

Perjanjian politik antara Kesultanan Deli dan pemerintah kolonial Belanda yang disepakati pada tahun 1907 memuat ketentuan bahwa sultan dan para pembesarnya diharuskan untuk memerintah Deli dengan adil. Selain itu, sultan juga dituntut untuk memakmurkan rakyatnya serta melimpahi mereka dengan kesejahteraan. Poin tersebut memberi gambaran bahwa modernisasi orang Melayu yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka dijamin oleh kontrak yang ada. Dengan kata lain, ini menunjukkan dukungan perjanjian politik dengan Belanda terhadap modernisasi orang Melayu. Adapun wujud pemakmuran rakyat itu salah satunya dapat dilihat pada dua poin dari isi perjanjian tersebut:

29. Sultan dan Orang-orang Besarnya harus memajukan penyuntikan dan pencacaran terhadap rakyatnya;
30. Sultan dan Orang-orang Besarnya harus memajukan pendidikan dan pengajaran rakyatnya (Sinar, 2011: 30-32).

Penyuntikan dan pencacaran adalah bagian dari modernisasi orang Melayu. Kedua hal itu adalah cara yang digunakan orang-orang Eropa dalam mencegah datangnya penyakit. Sementara itu orang Melayu pada masa-masa sebelumnya tidak pernah mengenal hal yang demikian. Orang-orang Melayu telah terbiasa menangani penyakit dengan obat-obatan tradisional. Obat-obatan itu berupa tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai apotek hidup. Alam sudah menyediakan berbagai kebutuhan mereka dengan penuh suka rela. Mereka tidak perlu membayar apalagi menanamnya dengan sengaja.

3. Lahirnya Gemeente Medan

Setelah didahului oleh pemusatan kegiatan di Medan, baru pada tahun 1909 Medan resmi menyandang status sebagai kota praja (*gemeente*). Butuh waktu sembilan tahun bagi dewan kota untuk menggodok hingga memunculkan nama wali kota Medan yang pertama pada tahun 1918, yakni Baron Daniel Mackay (Damanik, 2016: 64-65).

Modernisasi semakin menguat setelah Medan menjadi *gemeente*, dalam bidang pendidikan misalnya, pemerintah kota Medan beberapa kali membangun kursus dan sekolah-sekolah. Pada tahun 1920, pemerintah kota Medan membangun kursus bahasa Jerman. Bahasa asing merupakan modal besar dalam menghadapi modernisasi. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama tidak lagi terbatas dalam ruang lingkup regional semata. Kesadaran untuk membuka kursus tersebut merupakan dorongan bagi siapapun yang ingin belajar dan mendongkrak kapabilitasnya dalam menghadapi modernisasi (Sinar, 2011: 66).

Capaian dari proses modernisasi yang luar biasa terhadap Kota Medan adalah diresmikannya bandar udara di Kota Medan pada tahun 1928. Bandara yang diberi nama Polonia merupakan bandara pertama di pulau Sumatra serta yang kedua setelah bandara *Batavia* (Damanik, 2016: 226). Pengadaan bandara ini

membuka akses yang lebih luas dan mudah terhadap dunia internasional. Sebagai akibatnya, kota Medan mendapat peluang lebih besar untuk masuknya investasi asing yang pada gilirannya turut membangun berbagai infrastruktur modern di kota Medan. Orang Melayu sebagai penduduk kota Medan jugalah yang akan menikmati modernitas tersebut. Meskipun tidak seluruh infrastruktur dapat dinikmati oleh segenap lapisan orang Melayu, namun setidaknya mereka menjadi saksi atas kemodernan yang ada. Oleh karena itu, tak pelak lagi bahwa perubahan Medan menjadi *gemeente* ikut mendorong modernisasi orang Melayu di kota Medan.

B. Aspek-aspek Modernisasi

Setelah hijrah ke kota Medan, nafas modernisasi yang dibawa oleh Belanda kian merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan orang Melayu. Wujud modernisasi orang Melayu akan dilihat dalam empat aspek: pendidikan, pemukiman, gaya hidup dan kesenian.

1. Pendidikan

Modernisasi pada aspek pendidikan di kota Medan ditandai dengan berdirinya berbagai sekolah. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh para pengusaha perkebunan, pemerintah kolonial, misi keagamaan, dan pihak swasta (Damanik, 2016: 331). Institusi pendidikan berupa sekolah tidak dikenal sebelumnya oleh orang Melayu. Mereka pada umumnya mencukupkan diri dengan pengajaran tradisional bersama para guru mengaji. Sebelumnya tidak ada pemikiran di kalangan orang Melayu bahwa mengenyam pendidikan umum itu penting.

Pada mulanya pendidikan hanya dapat dirasakan oleh golongan bangsawan dan masyarakat kelas menengah ke atas (Damanik, 2016: 331). Pendidikan baru menjadi terbuka bagi sebagian besar penduduk bumiputra Indonesia pada tahun 1900. Hal ini dikarenakan pihak kolonial Belanda membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk mengisi posisi yang kosong di pemerintahan. Selain itu, tenaga kerja

bumiputra dapat dibayar dengan upah yang lebih murah (Wertheim, 1999: 116).

Sekolah yang awal sekali di Kota Medan bagi penduduk lokal bernama “Sekolah Melayu”. Sekolah ini sudah tentu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penggunaan nama sekolah itu menjadi garis pemisah yang jelas antara Belanda dan penduduk lokal. Menariknya, walaupun bernama Sekolah Melayu, namun kepala sekolahnya bukanlah seorang Melayu, melainkan pria Minangkabau yang bernama Sutan Mangkuto (Sinar, 2011: 77).

Pada tahun 1904, mulai dibangun sekolah yang benar-benar diperuntukkan bagi orang Melayu. Sekolah ini letaknya berhampiran dengan Sekolah Melayu. Secara resmi sekolah ini diberi nama *Delis-School*. Kentara sekali bahwa sekolah ini akan berkhidmat penuh bagi Kesultanan Deli dan rakyatnya, terutama anak-anak bangsawan Melayu serta beberapa anak pilihan dari para pejabat tinggi pemerintah (Reid, 2012: 96-97).

2. Permukiman

Pada dasarnya telah ada upaya modernisasi pada permukiman orang Melayu sewaktu masih berada di Labuhan Deli. Rumah sultan yang sempat dicatat *Netscher* sebelum 1865 berada dalam kondisi memprihatinkan, sudah mengalami perubahan setelah keberhasilan perkebunan. Muchrizad (2019) mendeskripsikan bahwa rumah Sultan Deli tergolong mewah pada masa itu. Hal ini dikarenakan rumah sultan telah memiliki jendela yang terbuat dari kaca. Walaupun fisik rumah masih berbahan dasar kayu, namun penggunaan kaca merupakan sesuatu yang mewah pada tahun 1800-an. Sementara itu, rumah rakyat biasa tidak sudah sangat beruntung dengan adanya celah untuk keluar masuk udara.

Setelah pindah ke kota Medan, kondisi permukiman orang Melayu semasa berada di Labuhan Deli mulai berubah. Pihak Belanda mengelompokkan permukiman penduduk berdasarkan kelompok etnis (Damanik, 2016: 127).

Penataan permukiman seperti ini menjadikan Kota Medan lebih teratur dan rapi. Hal ini merupakan corak permukiman khas Kolonial Belanda pada abad ke-19, yakni permukiman dibagi berdasarkan kelas-kelas para penduduknya. Golongan Eropa dan elite bumiputra menempati kompleks tertentu dengan rumah bertembok, berhalaman luas dan beratap tinggi. Sedangkan komunitas Tionghoa menempati kawasan pecinan dengan bangunan-bangunan yang rapat satu sama lain. Rumah mereka biasanya memiliki atap pelana lengkung. Rumah mereka biasanya disebut dengan ruko (rumah toko) karena bagian depannya lazim diperuntukkan bagi aktifitas perdagangan. Lokasi permukiman komunitas Tionghoa berada di tepi jalan raya, dekat dengan pasar kota. Adapun masyarakat bumiputra menempati wilayah kampung dengan rumah beratap pelana dari ijuk, daun rumbia, atau genting (Soekiman, 2014: 172-173).

Sementara itu, orang Melayu menempati daerah di sekitar Istana Maimun, yang disebut dengan Kota Matsum. Kota Matsum merupakan wilayah otoritas Sultan Deli, setelah terjadi dualisme pemerintahan di Kkota Medan. Hal ini dikarenakan setelah 1 April 1909, ada peraturan yang mengatur pembagian wilayah atas kota Medan yang terbagi atas wilayah sultan dan wilayah *gemeente* (Sinar, 2011: 58).

Di kota Matsum terdapat dua istana lain selain Istana Maimun, yaitu Istana Puri dan Istana Darat. Kedua istana itu, yang oleh Tengku Luckman Sinar dinamai juga dengan Istana Kota Maksum, baru selesai dibangun pada 12 November 1905 (Sinar, 2011: 56). Setelah kedua istana itu selesai dibangun, Istana Maimun hanya berfungsi sebagai kantor bagi sultan (Muchrizad, 2019). Sultan dan keluarga yang semula mendiami Istana Maimun kemudian pindah pada kedua istana tersebut. Lahan yang digunakan untuk istana itu sangat luas. Gaya arsitekturnya juga sudah mengikuti model Belanda. Bahan dasarnya sudah terbuat dari batu, tidak lagi kayu.

Sama seperti Istana Puri dan Istana Darat, Istana Maimun yang berfungsi sebagai tempat sultan menerima tamu dan kegiatan administrasi kesultanan tidak kalah mempesona. Istana ini menampilkan wajah modernitas yang mengagumkan. Adopsi arsitektur Eropa tampak pada lampu dan berbagai perabotan istana seperti kursi, meja, toilet, lemari dan pintu menuju balairung. Istana yang memiliki kamar berjumlah 40 buah ini juga menggunakan beberapa bahan yang langsung diimpor dari Eropa seperti ubin lantai, marmer dan teraso (Takari, 2012).

Permukiman elite Melayu ditambah pada sekitar tahun 1930. Sultan yang berwenang pada saat itu adalah Sultan Amaluddin Al Sani Perkasa Alam. Sultan menghendaki ditambahnya permukiman elite dikarenakan Istana Puri tidak mampu lagi menampung jumlah anggota keluarga yang terus bertambah. Sultan kemudian menyadari bahwa harus ada rumah bagi masing-masing keluarga, yang tetap berada dalam satu kawasan. Hal inilah yang menyebabkan hadirnya perumahan elite di sepanjang Jalan Mahkamah bagi keluarga sultan dan para bangsawan, seperti bendahara, para menterinya dan raja muda. Rumah-rumah yang terdapat di kompleks perumahan keluarga itu pun sudah mengadopsi rumah Belanda, bukan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Sama halnya dengan Istana Puri dan Istana Darat, permukiman ini juga tidak dapat dipertahankan hingga sekarang (Muchrizad, 2019).

Seiring dengan dibangunnya kompleks perumahan bagi Sultan dan keluarga serta para pembesarnya, ada pula ruang terbuka yang dibangun Sultan. Ruang terbuka itu terletak di seberang Masjid Raya Al Mashun. Lokasi ini terkanal dengan nama *Derikanpark* atau *Siti Khadijah Park* (Colombijn, 2005: 290, 436). Fungsinya adalah sebagai tempat sultan dan keluarga menghibur diri dari kepenatan. Kolam air dan pemandangan Masjid Raya Al Mashun sungguh meneduhkan.

3. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Orang Melayu yang semula hidup di kampung Labuhan Deli dan kemudian pindah ke kota Medan, turut berubah gaya hidupnya. Hal inilah yang disebut Damsar dan Indarayani (2017: 144) bahwa kota merupakan lokus gaya hidup.

Pada cara berpakaian sebenarnya telah mengalami modernisasi dengan pengaruh dari Islam. Mereka telah sering memakai pakaian tertutup, karena Islam memang mewajibkan hal itu. Orang Melayu bahkan menggemari kebudayaan Arab yang dekat dengan Islam (Husny, 1986: 55). Hal ini tampak dari kaum lelaki Melayu yang biasa menggunakan baju dengan gunting Cina (bagian kerah berbentuk bundar) atau jubah, sedangkan kaum perempuannya memakai pakaian yang panjang lengkap dengan kain tudung pula. Warna dan variasi pakaian mereka juga biasanya tidak terlalu beragam (Muchrizad, 2019).

Setelah kedatangan Belanda, tidak banyak yang berubah dari cara berpakaian orang Melayu. Kelengkapan pakaian mereka masih ada yang menunjukkan kesamaan dengan ketika berada di Labuhan Deli. Kaum lakinya tetap menggunakan baju, celana dan pada bagian pinggang sampai lutut ditutup oleh kain tambahan, umumnya kain sarung atau kain batik. Meskipun tidak banyak mengalami perubahan, namun cara berpakaian orang Melayu tetap merupakan salah satu gaya hidup yang dipengaruhi oleh peradaban Eropa dan merupakan aspek modernisasi yang cukup mudah diamati (Soekiman, 2014: 43).

Adapun kebiasaan “sarungan” adalah barang tradisional yang harus disingkirkan. Kebiasaan ini dipandang sebagai kekolotan yang menantang wajah perkotaan. Sementara itu, pakaian yang mendukung *image* kota modern adalah segala yang dikenakan oleh orang Barat. Tidak ada alasan yang cukup untuk menolak kenyataan bahwa pakaian ala Barat sejatinya memang membawa kemajuan yang selaras

dengan pemahaman atas kata modern, yakni sebagai kesadaran atas sebuah kemajuan yang berakibat pada penentangan terhadap kebiasaan-kebiasaan lama (Nordholt, 2002: 247). Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan lama harus ditinggalkan, meski tidak sepenuhnya, paling tidak ketika berada di ruang publik.

Sebagai bagian dari modernisasi orang Melayu dalam penampilan adalah penggunaan sepatu. Sepatu masih merupakan barang mahal, bahkan sampai setelah kemerdekaan. Kemewahan sepatu tampak pada surat kabar *Pewarta Deli* yang begitu bersemangat menawarkannya kepada pembaca. Meskipun turut mengiklankan barang lain, namun iklan sepatu mendapat perhatian lebih dengan tulisan yang ditebalkan (lihat Gambar 1). Sepatu identik sekali dengan modernitas. Tidak perlu heran, sebab masyarakat tradisional sudah terbiasa berjalan tanpa alas kaki ke mana saja. Mereka bahkan dilarang mengenakan alas kaki, seperti di Bali Selatan misalnya, karena alas kaki juga menentukan status. Mereka yang berhak menyamakan kakinya dengan sepatu hanyalah para pejabat kolonial Belanda, para bangsawan atau pejabat pemerintahan, dan kaum cendekiawan (Nordholt, 2002: 258-259). Hal ini juga tampak di lingkungan akademis. Seluruh siswa bisa saja mengenakan seragam sekolah yang sama. Namun, sepatu merupakan penanda modernitas yang secara khusus dikenakan oleh mereka yang “berhak”.



Gambar 1. Iklan Sepatu. Sumber: *Pewarta Deli*, 6 Juli 1917.

Sementara itu, para bangsawan Melayu di kota Medan tentu dapat menghibur diri dengan berpergian ke Eropa dan membangun rumah-rumah indah, sering disebut sebagai istana. Para bangsawan juga dapat menggelontorkan uang yang banyak demi terselenggaranya pesta-pesta di kalangan mereka (Reid, 2012: 66).

Namun, ternyata Sultan Deli tidak begitu kalap dengan kemewahan yang diperoleh. Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam (Tengku Besar Deli) misalnya, beliau juga memiliki mobil seperti sultan-sultan lain di Sumatera Timur, bahkan mobil uap keluaran pertama pada tahun 1900, namun tidak sebanyak yang dimiliki Sultan Machmoed dari Langkat (Colombijn, 2005: 283). Bahkan Sultan Ma'moen Al Rasyid telah membangun hampir 1.000 buah masjid dan berbagai fasilitas umum lainnya bagi kesejahteraan masyarakat Kesultanan Deli (Muchrizad, 2019). Walaupun demikian, ada juga di kalangan Sultan Deli yang bersikap lebih konsumtif dan menikmati fasilitas kemewahan yang ada. Ia adalah Sultan Osman Alsani Perkasa Alam, cucu dari Sultan Ma'moen Al Rasyid. Beliau dikenal sangat menyenangi pacuan kuda dan berusaha untuk melakukan kunjungan Eropa sesering mungkin (Reid, 2012: 206).

4. Kesenian

Pengaruh modernisasi dalam bidang kesenian memang tidak terlalu mengemuka dalam masyarakat Melayu di kota Medan. Hal ini dikarenakan kesenian bukanlah bidang yang fokus dikembangkan Kesultanan Deli. Masing-masing kesultanan di Sumatera Timur memiliki konsentrasinya masing-masing. Menurut Firdaus (2019), seorang maestro seni tari Melayu, kesenian lebih berkembang di Kesultanan Serdang, sedangkan Kesultanan Deli konsentrasinya adalah pada perniagaan.

Adapun yang menandai modernisasi dalam seni tari adalah adanya jenis tarian baru. Jenis tarian baru yang dimaksud adalah jenis tari pergaulan, yakni tarian yang dibawakan secara berpasang-pasangan. Jenis tarian ini tidak

didapati pada masa-masa sebelum mendapat pengaruh Barat. Pada masa sebelum bersentuhan dengan peradaban Barat. Tarian dibawakan oleh seorang pawang atau disebut pula dengan *bomo*. Hal ini dikarenakan tarian orang Melayu pada mulanya hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan ritual. Orang Melayu pada mulanya tidak mempersembahkan tarian dengan maksud penyambutan tamu atau hiburan sebagaimana yang sekarang dikenal. Jika pun ada yang dianggap sebagai hiburan, maka tarian itu biasanya dibawakan sederhana ketika mereka sedang bekerja di ladang atau sawah, setelah penat melanda. Mereka mulai bersenandung, berbalas pantun, dan menggoyang-goyangkan badan. Oleh karena itu, seni tari Melayu berubah konsepnya setelah mengalami modernisasi (Firdaus, 2019).

Secara umum, orang Melayu telah mendapat pengaruh Barat sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511. Pada masa inilah masuk unsur-unsur barat ke dalam tarian Melayu, salah satunya pada tari “Ronggeng Melayu”. Meskipun menurut penjelasan (Takari, 2018: 6) tarian ini muncul lebih awal dari abad ke-16, namun tarian ini sangat dipengaruhi oleh musik dan tarian Portugis. Tarian ini juga menyebar ke kalangan orang Melayu di Sumatera Timur pada abad yang sama dengan pendahulunya di Malaka. Oleh karena itu, modernisasi orang Melayu dalam bidang kesenian telah mendahului Belanda yang baru datang pada abad ke-19. Adapun pengembangannya dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan baru berlangsung dari tahun 1920-1930.

C. Faktor Penghambat Modernisasi

Sebuah peribahasa berbunyi “*tak ada gading yang tak retak*”. Peribahasa ini sudah lazim dikenal oleh masyarakat banyak. Jika diartikan secara sederhana, peribahasa tersebut bermakna tidak ada sesuatu pun yang sempurna. Begitu pula dengan proses modernisasi orang Melayu di Kota Medan. Proses itu tidak berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Terdapat dua

hal pokok yang menjadi faktor penghambat modernisasi orang Melayu di Kota Medan, yakni: (1) Migrasi Berbagai Etnis ke Kota Medan, dan (2) Revolusi Sosial di Sumatera Timur Pada Tahun 1946.

1. Migrasi Berbagai Kelompok Etnik

Goldscheider (1985: 292-293) mengungkapkan bahwa migrasi merupakan gejala modern yang terkait dengan kolonialisme. Meskipun pada masa silam migrasi kerap dilakukan oleh masyarakat tradisional, namun motivasinya berbeda pada masa kolonialisme. Jika pada mulanya perpindahan dikarenakan adanya perang atau penaklukan dan ketidakstabilan sosial-politik, maka alasan migrasi di era modern cenderung kepada aspek ekonomi. Masyarakat pada masa kolonialisme bahkan memberi perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan migrasi. Hal ini pula yang berlaku di kota Medan. Migrasi etnik kian deras melanda kota Medan disebabkan oleh dorongan langsung pemerintah kolonial Belanda. Pintu masuk migrasi itu adalah tumbuhnya usaha perkebunan.

Pada tahun 1878, ada sebuah kebijakan kolonial Belanda saat perkembangan perkebunan yang mengundang kedatangan etnis lain ke Medan dan sekitarnya. Kebijakan itu mengharuskan tuan kebun memberikan masyarakat penghuni wilayah konsesinya, yakni orang Melayu, berupa 4 bahu lahan. Kemudian sejak tahun 1884, para tuan kebun itu juga wajib memberi 1,5 bahu lahan konsesinya yang telah dipanen kepada masyarakat penghuni lahan. Mereka boleh menanam lahan itu dengan tanaman seperti padi dan jagung, selama bukan tanaman yang dapat menjadi barang ekspor atau laku di pasaran. Lahan yang diberikan inilah yang disebut sebagai tanah *jaluran* (Breman, 1997: 29-30).

Kebijakan di atas sangat menguntungkan. Paling tidak masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari lahan cuma-cuma tersebut. Banyak masyarakat luar Deli yang tergiur dengan adanya kebijakan semacam ini.

Maka berbagai etnik lain beramai-ramai masuk ke Deli. Tanah *jaluran* ini menjadi incaran masyarakat lain, yang padahal bukan penduduk setempat. Melihat penduduk setempat, yakni orang Melayu, mengusahakan tanah *jaluran*, mereka yang pendatang pun ikut masuk dan memanfaatkan lahan itu. Menurut beliau, sebagai akibat dari banyaknya orang yang mengklaim dan mengusahakan tanah *jaluran*, pada tahun 1910 mulai didata orang asli Melayu yang sah mengelola lahan itu. Kemudian hanya kepada mereka yang dinyatakan sah itulah, tanah *jaluran* itu berhak diserahkan (Mahmud, 2019).

Para imigran yang datang ke kota Medan dalam jumlah yang besar itu juga didukung oleh sultan. Sultan menghendaki agar *kawula*-nya tumbuh pesat. Oleh karena itu, sultan kemudian dengan mudah memberikan status rakyat kesultanan kepada para pendatang. Hal ini juga disusul dengan samanya hak para pendatang dengan penduduk asli. Kenyataan ini tentu mendapat sambutan baik dari para pendatang. Oleh karena itu, kota Medan menjadi tempat yang nyaman untuk mereka melabuhkan harapan. Tidak heran jika jumlah penduduk kota Medan kian melonjak.

Lonjakan penduduk yang datang ke kota Medan menunjukkan angka yang fantastis. Pada tahun 1905, penduduk kota Medan berjumlah 14.000 orang. Hanya butuh waktu 13 tahun saja, penduduk kota Medan telah bertambah hampir 30.000 jiwa, yakni 43.826 orang pada tahun 1918. Penduduk kota Medan pada tahun 1918 itu terdiri atas 409 orang Eropa, 35.009 orang Indonesia dari beraneka macam suku bangsa, 8.269 orang Cina, dan 139 orang Timur Asing (Sinar, 2011: 58).

Pada tahun 1930, penduduk kota Medan meningkat lebih pesat lagi. Pada tahun itu, kota Medan merupakan rumah bagi 76.000 orang, yakni 41.000 orang Indonesia dan 35.000 orang Asing. Komposisi orang Indonesia di kota Medan adalah sebagai berikut: a) 5.000 orang Melayu, b) 21.000 orang Jawa, c) 1.000 orang Batak Toba, d) 5.000 orang Mandailing, dan e)

9.000 orang berasal dari etnis Indonesia lainnya (Tabel 1). Wajar jika Pelzer (1985: 85) menyatakan bahwa orang Melayu di Sumatera Timur hanya berjumlah 15% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Komunitas Tionghoa bahkan telah merajalela sejak masa itu, jumlah mereka di kota Medan mencapai 35% dari jumlah keseluruhan penduduk. Dari data ini saja telah tampak bagaimana terdesaknya orang Melayu dengan kedatangan berbagai kelompok etnik pendatang.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Kota Medan Tahun 1930

Latar Belakang Etnis	Jumlah
Melayu, termasuk orang Karo dan Simalungun yang beragama Islam	5.000
Jawa, termasuk orang Sunda dan Betawi	21.000
Karo	-
Simalungun	-
Toba	1.000
Mandailing	5.000
Kelompok etnik Indonesia lainnya, termasuk orang Minangkabau dan Banjar	9.000
Eropa	4.000
Tionghoa	27.000
Timur Asing lainnya (Arab dan India)	4.000
Total	76.000

Sumber: Pelzer (1985: 86).

Gelombang migrasi berbagai etnis tidak begitu dapat diantisipasi oleh orang Melayu, selaku penduduk tempatan. Kondisi ini malah menjadikan mereka tidak hanya kalah dalam kuantitas, namun juga kualitas. Para pendatang dari etnik Mandailing dan Minangkabau memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada orang Melayu (Pelly, 2013: 67). Pendidikan mereka yang lebih tinggi menyebabkan mereka mudah mengamankan posisi ketika berada di kota Medan, bahkan melampaui apa yang orang Melayu raih. Orang Mandailing yang terdidik paling tidak dapat menjadi khadi, imam, guru, ataupun kerani dalam pemerintahan Kesultanan Deli (Pelly, 2013). Sedangkan orang Batak Toba menemukan cara lain untuk mengusir orang

Melayu dari tanah mereka. Mereka yang berhasil membeli tanah dari orang Melayu, kemudian memelihara babi dan anjing di pekarangan rumah mereka. Orang Melayu yang beragama Islam tidak menyenangi hal ini. Sebagai akibatnya, orang Melayu memilih pindah daripada harus bertahan dalam lingkungan yang seperti itu. Hasilnya adalah hanya sesama orang Batak saja lah yang dengan sukarela bertetangga dengan orang Batak lainnya. Strategi yang demikian cukup ampuh untuk mereka pgunakan demi memperluas permukiman mereka di kota Medan (Pelly, 2013).

Laszlo Szekely dalam Reid (2014: 306) menuturkan pengalamannya ketika mengunjungi Medan pada tahun 1902. Ia melihat bahwa orang Melayu semakin miskin. Perekonomian mereka terganggu dengan berkembangnya usaha yang dibangun oleh komunitas Tionghoa. Orang Melayu tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya diberi kesempatan untuk memupuk rasa benci terhadap orang Tionghoa. Apabila rasa benci sudah memuncak, mereka meluapkannya dengan mengamuk dan melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang berambut mirip kunci kuda itu.

2. Revolusi Sosial

Dalih yang sering digaungkan untuk membenarkan peristiwa ini ialah kesultanan telah menciptakan nuansa feodal. Adapun yang dimaksud dengan nuansa feodal itu adalah sistem pemerintahan yang usang. Para penyeru revolusi sosial memandang sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh raja tidak lagi relevan dengan kehendak zaman. Mereka menginginkan suatu pemerintahan yang benar-benar berdasarkan suara rakyat. Sementara itu, rakyat yang terprovokasi, terutama para pemuda semakin menggebu-gebu untuk mengganti tatanan itu kepada apa yang dihembuskan oleh golongan kiri (Harahap, 2019: 48-55). Semangat rakyat akan hal tersebut digambarkan oleh lukiskan Reid:

Rakyat yang pada waktu ini gelisah dan menuntut agar cara-cara demokrasi dijalankan selekas-lekasnya di daerah daerah istimewa. Rakyat berkehendak akan adanya Balai Perwakilan Rakyat di daerah itu. Kemauan rakyat adalah laksana banjir yang tidak dapat dihalang-halangi (Reid, 2012: 308).

Pikiran semacam ini dibangun oleh kaum sosialis-komunis di tengah-tengah masyarakat. Mereka berupaya agar masyarakat tersadarkan dan mau melawan. Dorongan ini terutama sekali direspon oleh para pemuda. Begitulah, pemuda dikenal sebagai motor pergerakan dan revolusi pada setiap masa. Mereka adalah mangsa empuk untuk disusupi ideologi-ideologi yang dikehendaki oleh pihak manapun, termasuk golongan kiri. Cita-cita kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan penuh oleh golongan mudanya.

Namun pandangan seperti di atas itu ditepis oleh orang Melayu yang kini tengah giat-giatnya mengkampanyekan kembali khasanah kebudayaan Melayu dan adat bersultan. Salah satu yang menentang tuduhan feodal itu adalah Tengku Muchrizad. Beliau aktif sebagai pegiat Forum Masyarakat Adat Deli dan pengurus Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid. Menurut Muchrizad (2019), sultan adalah pribadi yang *wara'* (sikap hati-hati dalam kehidupan sehari-hari). Bahkan Sultan Deli juga justru telah amat memakmurkan rakyatnya. Masyarakat Melayu pada masa itu tidak ada yang tidak sejahtera. Sultan juga membangun beberapa fasilitas demi kesejahteraan mereka.

Latar belakang lain atas peristiwa ini adalah sikap anti-republik yang ditunjukkan oleh para sultan. Sikap ini memang mewarnai wajah istana pada awal kemerdekaan. Para sultan sudah terlanjur nyaman dengan penghasilan tetap yang didapat dari Belanda. Mereka tentu berat melepas semua hal itu, apalagi harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Hal ini juga disebabkan oleh tidak terpenuhinya permintaan mereka agar Republik memperlakukan kesul-

tanan Melayu di Sumatera Timur, sebagaimana kesultanan/kerajaan di pulau Jawa. Kesultanan Yogyakarta, misalnya, sampai sekarang tetap berdiri sebagai kesultanan yang berhak atas rakyatnya. Penolakan ini diungkap Gubernur Hasan yang dikutip oleh Reid sebagai berikut:

Di Jawa diadakan Komisaris Tinggi untuk daerah istimewa sebagai penghargaan atas jasa-jasa penguasa di sana. Di Sumatera, soal komisaris tinggi akan dipertimbangkan juga apabila telah terbukti ada kerja sama antara Negara Republik Indonesia dengan penguasa (Reid, 2012: 308).

Namun sejatinya, sikap anti-republik itu berangsur surut. Pada tanggal 3 Februari 1946, para sultan, raja dan *sibayak* (gelar raja di Tanah Karo) telah berkumpul untuk suatu pertemuan. Pertemuan itu dihadiri oleh lima orang sultan dari Kesultanan Melayu Sumatera Timur, kecuali Sultan Serdang yang dalam keadaan sakit. Selain itu, hadir pula enam orang raja dari Simalungun, serta hampir seluruh *sibayak*. Hasil dari pertemuan itu adalah kemufakatan di kalangan penguasa Sumatera Timur, bahwa mereka telah menerima pinangan republik untuk bergabung dan bersama-sama membangun Indonesia. Sikap ini dikemukakan langsung oleh Sultan Langkat yang diangkat sebagai juru bicara dalam pertemuan itu:

Kami sultan-sultan dan raja-raja telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi itikad kami bersama untuk berdiri teguh di belakang presiden dan Pemerintah Republik Indonesia dan turut menegakkan dan memperkukuh Republik kita. Kami pun sangat insaf, bahwa susulan daerah istimewa mesti selaras dengan dasar republik, yaitu corak kedaulatan rakyat (Reid, 2012: 307).

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas tampaklah bahwa tindakan yang dilakukan oleh

orang-orang yang tidak bertanggungjawab pada aksi pemusnahan elite kerajaan di Sumatera Timur pada tahun 1946 tidak berdasarkan pada alasan yang murni. Mereka terlampau terburu-buru karena didorong oleh nafsu. Gejolak ini wajar hadir di kalangan pemuda, sebab semangat mereka memang tidak dapat dibendung. Mereka mudah tersulut dengan segala hal yang dapat menunjukkan eksistensinya. Mereka merasa puas hanya setelah hasratnya itu terpenuhi, apalagi jika dikaitkan dengan dalih misi terpuji, “mempertahankan kemerdekaan” dan “menciptakan pemerintahan yang demokratis”. Namun, sekali lagi, perbuatan semacam ini, pertumpahan darah yang mereka lakukan dengan cara sesadis itu, tidak pernah layak untuk dilakukan.

Takdir tak dapat ditolak, malang tak kuasa dielak. Sekuat apapun teriakan bahwa aksi itu tidak dapat dibenarkan, kenyatannya semua telah terjadi. Walaupun kondisi orang Melayu di kota Medan tidak separah Kesultanan Melayu lainnya. Namun teror yang hebat itu tetap menjadi beban pedih yang harus ditanggung oleh banyak orang Melayu di kota Medan. Mereka tentu juga memiliki kerabat dari Kesultanan Melayu lain, atau paling tidak mendapatkan kabar akan aksi brutal ini.

Pengalaman buruk itu terutama sekali dirasakan oleh para keturunan kaum bangsawan. Banyak di antara mereka yang menjadi semakin pesimis dengan keadaannya di tengah-tengah masyarakat. Para orangtua mulai menanggalkan gelar-gelar Melayu kepada anak-anak mereka. Ayah penulis sendiri misalnya, beliau merupakan keturunan OK (Orang Kaya). Namun oleh ayah beliau (penulis panggil dengan sebutan Atok), gelar itu tidak lagi disematkan. Hal ini juga yang membuat kebanyakan orang Melayu bersikap menyerah, menepi dari modernisasi yang berlangsung. Orang Melayu tidak lagi antusias dengan identitas kemelayuannya. Mereka menjadi lebih memilih bersikap tidak peduli, daripada harus merasakan patah hati lagi.

Kekecewaan orang Melayu itu cukup berdasar. Karena sebenarnya tidak seluruh orang Melayu melawan Republik Indonesia. Para sultan juga sudah membulatkan tekad untuk menjadi pendorong setia Republik Indonesia. Namun pengkhianatan justru datang dari saudara sebangsanya sendiri. Mereka yang katanya memperjuangkan demokrasi itu malah menjadi liar dan menghabisi peradaban orang Melayu. Oleh karena itu, setelah revolusi sosial 1946 peran orang Melayu semakin tidak kelihatan jejaknya. Mereka membutuhkan waktu lama untuk membalut luka, setelah dikhianati orang-orang yang semula menumpang di negerinya.

Ditambah lagi, setelah merebut kuasa kesultanan, posisi-posisi pemerintahan tidak diserahkan kepada orang Melayu, yang merupakan penduduk tempatan. Posisi penting dalam tubuh pemerintahan dan jabatan strategis lainnya justru diisi oleh para pendatang. Orang Melayu benar-benar dicampakkan. Maka tidak heran jika mereka memutuskan untuk menyingkir dan bukannya bertahan. Hal ini juga diterangkan Damanik:

Terpuruknya etnik Melayu di Kota Medan ialah akibat ketidakadilan ekonomi, sosial dan spasial yang dialami oleh 'etnik tuan rumah' (*ethnic host*) itu. Orang Melayu yang kurang mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan, perekonomian dan lain-lain tidak dapat berkembang secara finansial sehingga semakin meminggirkan kelompok etnik itu di Kota Medan (Damanik, 2017: 137).

SIMPULAN

Orang Melayu semula menikmati segala modernitas di kota Medan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Walaupun sebenarnya orang Melayu yang paling merasakan dampak modernisasi itu ialah para elitnya. Posisi orang Melayu dalam panggung modernisasi itu didukung penuh oleh kolonial Belanda melalui kontrak politiknya dan para pengusaha per-

kebunan, melalui upaya mendirikan fasilitas-fasilitas modern demi menjalankan bisnis mereka. Modernisasi itupun menarik perhatian masyarakat luar. Mereka berbondong-bondong pindah ke kota Medan. Kondisi ini mengancam orang Melayu. Hingga setelah kemerdekaan dan revolusi sosial, kepercayaan terhadap para elite Melayu pudar. Pudarnya kepercayaan itu seiring-sejalan dengan berkhirnya kekuasaan orang Melayu, serta terusirnya orang Melayu dari proses modernisasi di kota Medan.

REFERENSI

- Anderson, J. (1826). *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Breman, J. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli; Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: PT. Pusataka Utama Grafis.
- Colombijn, F., dkk., (eds.) (2005). *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Damanik, E. L. (2016). *Kisah dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan Tahun 1870-1942*. Medan: Simetri Publisher.
- Damanik, E. L. (2017). *Kisah dari Deli: Masalah Sosial dan Pembangunan di Kota Medan, Jilid II*. Medan: Simetri Institute.
- Damsar & Indarayani. (2017). *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus, J. R. (2019). *Modernisasi Orang Melayu di Kota Medan, 1891-1946*. Medan: tidak diterbitkan.
- Goldscheider, C. (1985). *Populasi, Modernisasi dan Struktur Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Harahap, H. (2019). Revolusi Sosial di Simalungun Tahun 1940. *JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies*, 1(2), 48-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jas>

- merah.v1i2.13006
- Husny, T. L. (1986). *Butir-Butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Isjoni. (2012). *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud, D. (2019). *Modernisasi Orang Melayu di Kota Medan, 1891-1946*. Medan: tidak diterbitkan.
- Muchrizad, T. (2019). *Modernisasi Orang Melayu di Kota Medan, 1891-1946*. Medan: tidak diterbitkan.
- Nasution, J. (2018). Transformasi Modernitas di Kota Medan: Dari Kampung Medan Putri hingga Gemeente Medan. *Jurnal Sejarah*, 1(2), 65–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.26639/js.v1i2.83>.
- Nordholt, H. S. (2002). *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pelly, U. (2013). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Perkotaan*. Medan: Unimed Press.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur, 1863–1947*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pewarta Deli*, 6 Juli 1917.
- Priyadi, S. (2015). *Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Reid, A. (2012). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Reid, A. (2014). *Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sinar, T. L. (2005). *Adat Budaya Melayu Jati Diri dan Kepribadian*. Medan: Forum Komunikasi Lembaga Adat Provinsi Sumatera Utara.
- Sinar, T. L. (2011). *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Sinar Budaya Group.
- Soekiman, D. (2014). *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Takari, M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. Medan: USU Press.
- Takari, M. (2018). *Ronggeng Melayu Sumatera Utara: Kesenambungan, Perubahan dan Pola Ritme Gendang*. Medan: UPT. Taman Budaya Sumatera Utara.
- Wertheim, W. F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.